

Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sugianto

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir

Email: sugiantoramlan90@gmail.com

Abstrak

Perkembangan BMT yang begitu pesat tergambar dari telah tergabungnya 5000 lebih BMT dalam Absindo (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia) tahun 2017. Namun praktik dilapangan keberadaan BMT kurang diperhitungkan sebagai model pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai sistem pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, perlu dilakukan pembaharuan sistem pengelolaan dan evisensi administrasi penyaluran BMT, kedua, melakukan perbaikan dalam manajemen pemberdayaan masyarakat secara maksimal dan ketiga, pembaharuan terhadap model dalam melakukan pengembangan BMT di Indonesia.

Kata Kunci: *Baitul Mal Wat-Tamwil, Pemberdayaan Ekonomi*

Abstract

The rapid development of BMTs is illustrated by the joining of more than 5000 BMTs in Absindo (the All-Indonesian BMT Association) in 2017. However, the practice in the field of the existence of BMTs is not taken into account as a model of empowerment in improving the community's economy in alleviating poverty. So from the problems above, the writer is interested in studying in depth about the BMT management system in empowering the people's economy. Based on the results of the study, it can be concluded that first, it is necessary to update the management system and administration of BMT distribution, second, to make improvements in the management of community empowerment to the fullest and thirdly, to update the model in developing BMT in Indonesia.

Keywords: *Baitul Mal Wat-Tamwil, People's Economic Empowerment*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.

Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. Secara faktual, BMT kemudian berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. BMT sendiri beroperasi sangat mirip dengan perbankan syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani adalah nasabah mikro dan kecil. Ditengah kondisi ril jumlah orang miskin di Indonesia masih besar pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), versi BPS, batas kemiskinannya pendapatan per kapita Rp 374.500 /bulan.

Apalagi banyak orang miskin yang ada di Indonesia tidak bankable, maka negara ini masih pantas disebut negara belum sejahtera jika orang miskinnya masih banyak ditambah lagi pengangguran yang tinggi menunjukkan banyak sumber daya yang belum termanfaatkan, maka untuk meningkatkan produktifitas masyarakat miskin (pro-poor) tersebut perlulah jaringan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.

Kemiskinan akan membuat seseorang dekat dengan kekufuran. Pengurangan pengangguran dan meningkatkan ekonomi lemah menjadi mantap merupakan pembangunan skala prioritas. Saat ini BMT makin dilirik, bukan saja karena tanggung jawab keislaman dalam mengembangkan dakwah islamiyah di Indonesia, namun disaat pasar modal lesu, LKMS inipun jadi alternatif, apalagi BMT sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong sektor riil.

Meskipun perkembangan BMT yang begitu pesat tergambar dari telah bergabungnya 5000 lebih BMT dalam Absindo (Asosisasi BMT Seluruh Indonesia) tahun 2017. Namun praktik dilapangan keberadaan BMT kurang diperthitungkan sebagai model pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai sistem pengelolaan BMT dalam melakukan perberdayaan ekonomi rakyat. Berdsarkan permasalahan diatas penulis mencoba merumuskan permasalahan tentang sistem pengelolaan BMT dalam melakukan perberdayaan ekonomi rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil pendekatan studi literatur. Tujuan penelitian ini untuk menemukan bagaimana sistem manajemen BMT dalam fungsi dan peranannya dalam mendukung program perberdayaan ekonomi rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)

Baitulmal berasal dari bahasa Arab “bait” yang berarti rumah, dan “al-maal” yang berarti harta. Jadi, secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitut Tamwil (bait=rumah, at-Tamwil= pengembangan harta. Baitul Mal wat-Tamwil pada dasarnya merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Baitul Mal wat-Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu Baitul Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan Zakat, Infaq dan shodaqoh, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, fungsi sosial dan fungsi komersial. Hal ini berbeda dengan institusi ekonomi yang selama ini telah ada di Indonesia yang umumnya hanya menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu yayasan yang memiliki fungsi sosial, koperasi memiliki fungsi sosial, sedangkan PT, Firma, dan CV yang memiliki fungsi komersial. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berfungsi sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti: perdagangan, industri, pertanian dan lainnya.

Pada sisi ini, baitulmal itu merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum Muslimin. Baitulmal sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran belanja negara telah mulai diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Pengelolaan baitulmal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya, hingga akhirnya kekhalifahan Islam runtuh pada tahun 1924 M. Baitul Maal wat-Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah non-perbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena lembaga ini didirikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan informal lainnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.

- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- c. Lembaga ekonomi umat yang di bangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT. Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan fungsi BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.
- e. Pola hubungan BMT dan anggotanya dalam aspek bisnis diatur dengan sistem bagi hasil.

Baitul Maal wat- Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Penghimpunan dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM Tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan Islami sehingga diharapkan mampu berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan globalisasi.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkembang dan berputar serta termanfaatkan secara optimal didalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak terutama masyarakat lapisan bawah.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Ikut menata dan memadukan program pembangunan dimasyarakat lapisan bawah.
- e. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk –produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Fungsi sentral dari adanya BMT adalah meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minimal, peningkatan ini menjadi pokok agar eksestensi dari tujuan dan keberadaan BMT ditengah masyarakat dapat dirasakan.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI,2003):

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguh pun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN –MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).
2. Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada anggota/nasabah berdasarkan kesepakatan anggota/nasabah. Nasabah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000).

3. Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah muta'ah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi bantuan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

Secara umum bentuk-bentuk produk atau jenis-jenis usaha yang dilakukan BMT adalah sebagai berikut:

- a. Bidang usaha, memobilisasi simpanan sukarela dari anggota berbentuk simpanan Sukarela Mudharabah (S.M) sebagai berikut: S.M. Biasa, S.M. Walimah , S.M.Pendidikan, S.M. Aqiqah, S.M. Haji, S.M. Perumahan, S.M. Umrah, S.M. Kunjungan Wisata, S.M. Qur'ban, Sukarela titipan Basis, S.M. Idhul Fitri, Dan lain-lain, produk simpanan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.
- b. Kegiatan Pembiayaan (P) usaha mikro dan kecil bawah dan kecil antara lain berbentuk :
- 1) Pembiayaan Mudharabah yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), dewasa dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.
 - 2) Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil bersyariah) maksudnya adalah keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.
 - 3) Pembiayaan Murabahah (pemilikan barang jatuh tempo) adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan.Maksudnya pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati
 - 4) Pembiayaan Ba'ibitsaman ajil (pemilikan barang cicilan) adalah jualbeli barang pembeyaran cicilan. Harga jual beli adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

B. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Beberapa definisi pengembangan ekonomi umat atau masyarakat (Community Economic Devlopment) menurut beberapa pakar antara lain: sebagai sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah masyarakat dibidang ekonomi. Menurut Edy Soeharto, pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi.

Dari definisi tersebut dapat penulis pahami bahwa pengembangan atau pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun atau mengangkat harkat dan martabat masyarakat dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat yang memang sudah memiliki potensi artinya masyarakat tersebut memang sudah ada atau sudah memiliki skiil atau keahlian, akan tetapi keahlian atau potensi itu belum terlihat/tampak, adanya dorongan dan motivasi tersebut diharapkan tentunya agar mereka meningkatkan potensi yang mereka miliki dan mengupayakan peningkatan tersebut melalui tindakan nyata. Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Sedangkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk membantu dan memberikan dorongan kepada masyarakat di dalam meningkatkan kualitas kehidupannya dalam bidang ekonomi dengan memberikan penguatan berupa pemberian modal untuk memperkuat atau mengembangkan usaha para pedagang mikro agar lebih berdaya melalui kegiatan yang mengarah pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, seperti: penguatan pada para pedagang mikro seperti: home industri tahu, pedagang kelontongan, pedagang elektronik, pedagang sayuran, pedagang bakso, mie ayam dan gorengan, bengkel motor dll.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pada sektor perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Pemberdayaan biasanya melibatkan sumber daya manusia, seperti masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi cenderung menekankan pada dua hal, yakni primer dan sekunder. Kecendrungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (pemberian modal) kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Dengan memberdayakan masyarakat dalam perekonomian, maka secara tidak langsung akan menciptakan sumberdaya manusia yang sejahtera dan mandiri. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, secara umum manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama tetapi berbeda tingkat kebutuhannya. Maslow (1994) mengemukakan bahwa pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang meliputi: kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mengandung tiga misi. Pertama misi membangun ekonomi masyarakat dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan pekerjaan, laba, tabungan investasi, kelangsungan usaha dan lain sebagainya. Kedua pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. Ketiga membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islamiyah yang dapat melalui zakat, infak, shodaqoh dan waqaf serta menjadi bagian pilar perekonomian Indonesia. Dalam upaya membentuk model pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut penulis dapat dilakukan melalui tiga tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembaharuan Sistem Pengelolaan dan Evisensi Administrasi Penyaluran BMT

Pembaharuan sistem pengelolaan BMT dengan cara pertama, BMT harus mampu memberikan syarat garansi kepada individu untuk setiap pembiayaan yang diberikan. Harus ada seseorang yang bertanggung jawab secara finansial dan tentu telah mengenal karakter terhadap kapasitas pihak yang digaransi. BMT membuat kebijakan bahwa karyawannya menjadi personal garantor bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan. BMT harus melakukan proses pencarian informasi agar bisa menilai apakah calon debitur layak untuk mendapatkan pembiayaan. Dan tentunya akan lebih mudah dan reliable dibandingkan sistem perbankan konvensional karena bersifat personal dan mengandalkan kedekatan religius.

Kedua, BMT harus bisa menghimpun dana dengan baik misalnya mempermudah persyaratan yang bersifat administratif, sehingga nasabah akan merasa lebih ringan untuk menyimpan dana, seperti penghapusan pajak. Kemudian menjalin hubungan secara personal, seperti aktif mendatangi kegiatan yang bersifat religius di dalam sebuah komunitas. Atau juga bisa dengan memberikan pelayanan lebih selain penjaminan nasabah seperti merencanakan hadiah umrah bagi nasabah yang setia. Pada akhirnya, dengan melaksanakan kedua hal yang sederhana tersebut, penulis percaya bahwa konsep BMT ini akan sangat bermanfaat sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat.

2. Upaya Pengelolaan Pemberdayaan Umat secara Maksimal

Pemberdayaan merupakan upaya memperluas pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Atau dengan kata lain pemberdayaan adalah membuat komunitas lokal mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengejar pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.

Penulis memahami bahwa upaya pemberdayaan adalah membuat masyarakat atau suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka harus ada kesadaran bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain adanya kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan bahwa mereka memang mampu berbuat.

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, kemampuan kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman kerja pada proyek percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat menyertai komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencarikan bantuan perangsang, disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis.

Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BMT) ekonomi rakyat harus bekerja dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu adanya langkah-langkah yang harus di tempuh sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas.
- b. Kemudian dilakukan pengecekan dilapangan guna menyakinkan adanya masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya.
- c. Inventarisasi alternatif memecahkan masalah.
- d. Mempelajari aturan –aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah atau LSM.
- e. Melakukan tindakan persuasif agar komunitas menyadari bahwa mereka harus meningkatkan kualitas hidupnya, mengatasi masalahnya sendiri untuk mencapai harapannya. Upaya ini harus bekerjasama dengan pemerintah desa yang menyetujui program ini dan para volunteer yang berasal dari komunitas tersebut.
- f. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah diyakini bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya.
- g. Penyusunan kelompok kerja.
- h. Suatu kelompok kerja menangani sektor pemberdayaan.
- i. Penyusunan program kerja, hendaknya prokja itu sendiri dengan menerima masukan dari aparat pemerintah desa dan elit desa penghubung hanya menjadi fasilitator.
- j. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sektor yang akan dikembangkan melalui penyuluhan dan sebagainya.
- k. Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya.
- l. Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat.
- m. Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan materil perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain.
- n. Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi pemberdayaan.

3. Pembaharuan Terhadap Model dalam Melakukan Pengembangan BMT

Dalam kaitannya dalam pengembangan ekonomi rakyat dan lembaga mikro (seperti BMT) maka hal yang paling penting adalah investasi pada bidang modal manusia. Pentingnya modal manusia ini disebabkan pada dasarnya hampir semua kegagalan dalam konsep pembagunan disebabkan mismanajemen dan korupsi. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM Indonesia terutama kualitas spiritualnya.

Kelemahan lain adalah kondisi yang tidak kondusif dalam menciptakan iklim kewirausahaan. Iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adanya usaha untuk menciptakan level yang sama untuk seluruh pemain (dalam regulasi dan penegakannya ataupun aksesibilitas) menyebabkan tingginya exit rate di kalangan pengusaha di berbagai sektor ekonomi. Masalah lain adalah kemampuan kewirausahaan secara individu (berkaitan dengan kemampuan menciptakan, mereplikasi atau inovasi teknologi) yang masih merupakan bagian dari modal manusia dan jejaring (modal sosial). Dalam hubungannya dengan penciptaan modal finansial dan modal manusia ini.

Maka Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) telah menginisiasi sebuah lembaga kader untuk pengembangan masyarakat yang berorientasi menguatkan lembaga intermediari sektor keuangan melalui BMT untuk mengatasi masalah diatas. Program ini diberi nama Community Leaders Program (CLP). CLP ini menerapkan sistem kuliah lapang dengan metode pembelajaran partisipatif. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang yang luas bagi anak didik untuk berkreasi. (karena selama ini akar dari ketidakmampuan untuk melihat peluang, mencipta dan bekerjasama disebabkan pola pembelajaran yang diterapkan tidak menghadirkan ruang tersebut di sekolah). Tujuan utama dari CLP ini sendiri adalah menjawab tantangan keterbelakangan yang dialami masyarakat (terutama) perdesaan.

Dengan membentuk kader yang mampu menggerakkan ekonomi perdesaan. Dengan entry point BMT sebagai awal untuk menciptakan akses pembiayaan. Hal lain yang menjadi 'desain' dari CLP ini adalah perbaikan akhlak dan perilaku kader di dalam bermuamalah. Mengingat permasalahan spiritual ini juga ikut

membangkrutkan bangsa. Dengan adanya investasi di bidang SDM (human capital) ini diharapkan pembangunan wilayah dapat bertumpu pada kemampuan sumberdaya lokal.

SIMPULAN

Sistem pengelolaan BMT dalam melakukan pemberdayaan atau pengembang (pengelola BMT) akan meningkatkan ekonomi umat diantaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, perlu dilakukan pembaharuan sistem pengelolaan dan evisensi adminstrasi penyaluran BMT, kedua, melakukan perbaikan dalam manajemen pemberdayaan masyarakat secara maksimal dan ketiga, pembaharuan terhadap model dalam melakukan pengembangan BMT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djzuli dan Yadi Janwari. (2002). Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, cetakan pertama
- Frans Wiryanto Jomo, 1986, Membangun Masyarakat, Bandung, Alumni
- Friedmann. (1992). Empowement: the Politics of Alternative Development. (Cambridge Mass: Blackwell Publisher,
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> (diakses tanggal 2/08/2018)
- Karnain Purwa Atmaja, M. Syafi'i Antonio. (1992). Apa dan Bagaimana Bank Islam, Jogjakarta : Dana Bhakti Prima Yasa
- M. Dawam Raharjo. (1993). Islam dan Transpormasi Sosial Ekonomi, Jogjakarta: LPPI, UMY
- Muchtar Masoed. (1997). Jurnal MediaInovasi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Muhammad Ridwan. (2011). Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press
- Nurul Huda, Agus Suprayogi,et.al. (2012). Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- PINBUK. (1999). Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja Terampil(P3T), Depnaker dan Pinbuk, Lampung.